

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai unit terkecil pemerintahan di Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa untuk mengatur urusan rumah tangganya.<sup>2</sup>

Tuntutan terhadap lembaga sektor publik yaitu mewajibkan seluruh lembaga sektor publik termasuk pemerintah desa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Transparansi dan akuntabilitas dapat terwujud apabila lembaga sektor publik telah memenuhi beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Asas rekognisi dan asas subsidiaritas menempatkan desa tidak hanya sekedar sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek dan pelaku pembangunan. Seiring dengan peran dan kewenangan Desa yang semakin besar, Desa juga harus mengelola dana yang besar pula. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, mengamanatkan alokasi APBN ke Desa yang dikenal dengan Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Dengan besarnya dana yang dikelola oleh Desa dari berbagai sumber, di satu sisi Desa memiliki keleluasaan untuk membangun, namun di sisi lain menciptakan risiko karena ketidaksiapan dalam pengelolaan keuangannya.<sup>4</sup>

Permasalahan dalam pengelolaan keuangan Desa ditunjukkan dengan adanya korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Aktor yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana desa terjadi pada berbagai level (desa, kecamatan) dan pada berbagai tahap pengelolaan keuangan. Permainan anggaran yang dilakukan aktor-aktor tersebut terjadi pada saat proses perencanaan maupun saat proses pencairan. Sebagai contoh pada tingkat kecamatan, kewenangan camat melakukan evaluasi mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) membuka peluang pemerasan anggaran. Kasus penyalahgunaan dana desa dapat terjadi karena

---

<sup>4</sup> A Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Media Pustaka, 2014), hal. 4

beberapa faktor, diantaranya yaitu minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, tidak adanya transparansi, serta kurangnya pengawasan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 Ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban yang dimaksud dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan dana, Kepala Desa harus menyusun laporan keuangan, berupa laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dengan Laporan Kekayaan Milik Desa sebagai lampiran. Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan hal baru bagi Desa. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik laporan keuangan yang berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dipahami berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan yang berkualitas tersebut diperlukan sebagai perwujudan akuntabilitas untuk memberikan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena di atas, penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan khususnya Pemerintah Desa menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Faktor pertama yang

---

<sup>5</sup> Alvina Ghina Riyanita, "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2020

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Desa yaitu sistem pengendalian internal. Dalam sebuah lembaga dibutuhkan adanya pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas pada lembaga tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan dalam kegiatannya. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maka dibutuhkan adanya pengendalian internal yang efektif. Dengan adanya sistem pengendalian internal maka akan menjamin keakuratan data dan akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tujuan dari sistem pengendalian internal adalah menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.<sup>6</sup>

Apabila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Dengan demikian, sistem pengendalian internal diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal di atas sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayani yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>7</sup>

Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia menurut Setyowati ialah kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan

---

<sup>6</sup> Indra Bastian, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hal. 450

<sup>7</sup> Mahayani, Sulindawati dan Dewi, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)". *E Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017

tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan berbagai bekal seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu mencakup kemampuan individu, kemampuan suatu organisasi, atau bahkan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Peran sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan tujuan sektor publik. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkompeten, nantinya akan mampu memengaruhi kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Maka dari itu sumber daya manusia harus berkompeten dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tanggungjawab, dalam hal ini yaitu akuntansi dan keuangan yang memiliki dampak pada pengelolaan keuangan.<sup>8</sup>

Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah pemahaman akuntansi. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.<sup>9</sup> Hal ini mengungkapkan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam penyusunan laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para

---

<sup>8</sup> Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

<sup>9</sup> Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010

pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Faktor keempat yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor yang diduga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah penggunaan aplikasi sistem keuangan, seperti SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat mendukung proses pelaporan keuangan dengan mempercepat proses pengolahan data transaksi, serta dapat menghindari dan meminimalisir kesalahan. Dengan proses penyusunan yang lebih cepat dan kesalahan yang lebih minimal diharapkan pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dari segi penyampaian tepat waktu dan akan meningkatkan keandalan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan tepat waktu akan sangat bermanfaat. Selain tepat waktu dan andal. Laporan keuangan juga dapat dibandingkan antar desa. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi SisKeuDes diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Teori di atas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Sukriani yang menyatakan bahwa menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.<sup>10</sup>

Penyusunan laporan keuangan sektor publik atau pemerintahan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat menjadi SAP. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 Ayat 2 yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil mempertahankan kinerja mereka dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pada tahun anggaran 2019, mereka berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berikut ini adalah perkembangan opini BPK atas LKPD Kabupaten Tulungagung mulai tahun 2010-2019:

---

<sup>10</sup> Sukriani, M. Devi dan Wahyuni, "Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes di Kecamatan Negara", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Undiksha*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2018

**Gambar 1. 1**  
**Perkembangan Opini BPK atas LKPD di Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2011-2019**



Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia <sup>11</sup>

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan nomor 73/LHP/XVIII.SBY/06/2020 tanggal 26 Juni 2020, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2019. Dari hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan begitu, selama empat tahun berturut-turut yaitu tahun mulai tahun 2016-2020 Pemerintah Kabupaten Kediri berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil observasi di lapangan pemerintah Desa Mojo sudah menunjukkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu pemerintah Desa Kedawung memasang spanduk APBdes

<sup>11</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK), diakses melalui <http://surabaya.bpk.go.id/kabupatenkediri>, diakses pada Tanggal 15 Maret 2021 Pukul 11:49



di depan kantor desa sehingga masyarakat dapat mengetahui jumlah penerimaan, pembiayaan dan belanja desa. Masyarakat juga diberi akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah. Desa Kedawung secara cepat dan tanggap melayani masyarakat dalam hal ini pemerintah Desa Kedawung sudah menerapkan prinsip keadilan dan responsif. Artinya dari segi pemerintahan Pemerintah Desa Kedawung sudah menunjukkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Kedawung sudah memakai aplikasi sistem keuangan yaitu SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) yang dikembangkan bersama oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari segi sumber daya manusia yang ada pada Pemerintahan Desa Kedawung rata-rata alumni SMA dan beberapa yang alumni S1 meskipun tidak semuanya. Pada Pemerintah Desa Kedawung juga terdapat sistem pengendalian internal berupa pengawasan komprehensif terutama pada kinerja dan keuangan akan tetapi berdasarkan hasil observasi terkait pelatihan bagi aparat Desa jarang sekali diadakan. Maka berangkat dari hasil observasi ini peneliti ingin meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa Kedawung. Maka peneliti membuat judul penelitian **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bahwa pada pemerintahan Desa Kedawung sudah menerapkan SisKeuDes (Sistem Keuangan Desa) yang didukung oleh sumber daya manusia yang rata-rata alumni SMA dan ada beberapa yang alumni S1, pada Pemerintah Desa Kedawung juga terdapat sistem pengendalian internal berupa berupa pengawasan komprehensif terutama pada kinerja dan keuangan akan tetapi berdasarkan hasil observasi terkait pelatihan bagi aparat desa jarang sekali diadakan. Maka identifikasi masalahnya apakah data hasil observasi tersebut juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Desa Kedawung.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?

3. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?
5. Apakah sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji signifikansi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.
2. Untuk menguji signifikansi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

3. Untuk menguji signifikansi pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01?
4. Untuk menguji signifikansi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.
5. Untuk menguji signifikansi pengaruh sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada mata kuliah Akuntansi yaitu bidang akuntansi sektor publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah khususnya pada Pemerintah Desa sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi penulis**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang faktor faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan

keuangan pemerintah khususnya pada Pemerintah Desa sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

b. Bagi Pemerintah Desa Kedawung

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan sumber pembanding bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pemerintah khususnya pada Pemerintah Desa sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

d. Bagi IAIN Tulungagung

Sebagai tambahan referensi penelitian dan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi khususnya bidang Akuntansi Sektor Publik serta memberikan kesempatan untuk memperluas kajian penelitian berikutnya.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup merupakan suatu batasan yang memudahkan pelaksanaan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan

aspek tertentu terhadap suatu objek. Sedangkan pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan dari masalah yang akan diteliti. Batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus dan spesifik. Ruang lingkup pada penelitian ini adalah ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

## **2. Keterbatasan Penelitian**

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka penulis membuat batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian variabel independen terhadap variabel dependen yaitu untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Desa Kedawung Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

## **G. Penegasan Istilah**

### **1. Definisi Konseptual**

Berkaitan dengan judul penelitian diperlukan penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan. Berikut penjelasan dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personil lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan operasi, pelaporan dan kepatuhan.<sup>12</sup>
- b. Kompetensi sumber daya manusia Kompetensi sumber daya manusia menurut Setyowati ialah kemampuan sumber daya manusia dalam melakukan tugas serta tanggungjawab yang telah diberikan dengan berbagai bekal seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi mencakup kapasitasnya, yaitu mencakup kemampuan individu, kemampuan suatu organisasi, atau bahkan suatu sistem untuk melaksanakan

---

<sup>12</sup> Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010), hal. 147

fungsi-fungsi atau kewenangannya guna mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.<sup>13</sup>

- c. Pemahaman akuntansi adalah kemampuan paham dan memahami akuntansi atau bisa di artikan mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan.<sup>14</sup>
- d. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi informasi dalam mengolah data, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara guna menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan di berbagai organisasi.<sup>15</sup>
- e. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 adalah standar yang mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka

---

<sup>13</sup> Setyowati, Ishtika dan Pratiwi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang", *Jurnal Kinerja* Vol. 20 No.2 Tahun 2016

<sup>14</sup> Safrida Yuliani, Nadirsyah dan Usman Bakar, "Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Banda Aceh)", *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi* Vol. 3 No. 2 Tahun 2010

<sup>15</sup> Mahayani, Sulindawati dan Dewi, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jembrana)". *E Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2017



meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.<sup>16</sup>

## 2. Definisi Operasional

Pengertian operasional merupakan definisi variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah sistem pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kedawung yang didukung dengan kompetensi sumber daya manusia yang ada serta pemanfaatan teknologi informasi dan pelatihan bagi aparat pemerintah desa mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan Pemerintah Desa Kedawung Kabupaten Mojo Kabupaten Kediri sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan alat bantu bagi pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan yang sistematis dari isi sebuah karya ilmiah. Sistematika pembahasan ini dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bagian Awal** yang berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji,

---

<sup>16</sup> Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang “*Penyajian Laporan Keuangan*”, ( Komite Standar Akuntansi Pemerintah, 2019), hal. 33

halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. **Bagian Utama (Inti)** yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun bagian utama adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diawali dengan *grand theory* atau landasan utama yang menjadi materi utama dalam penelitian, terdapat penelitian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, kerangka konseptual yang menunjukkan sekilas variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, kerangka konseptual penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen

dan skala pengukuran, populasi sampling dan sampel penelitian, teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang paparan atau deskripsi data/temuan penelitian yang disajikan dalam sebuah pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian, hasil analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

#### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori-teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

#### **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini berisi hasil akhir dalam penelitian dan memberikan kesimpulan serta saran dalam skripsi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kuantitatif adalah temuan pokok atau simpulan yang harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah.

3. **Bagian Akhir** yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.